

**KOMPARATIF HORIZONTAL
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Embilia Kristina, Elfreda Aplonia
Lau, Titin Ruliana**

ABSTRAKSI

Embilia Kristina, Komparatif Horizontal Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat bimbingan Ibu Elfreda A. Lau sebagai Dosen pembimbing I dan Ibu Titin Ruliana sebagai Dosen pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui perbedaan yang signifikan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan lain dengan pendapatan lain yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 dan menganalisis dan mengetahui kemandirian fiskal Kabupaten Kutai Barat selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2014.

Dasar teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah teori akuntansi publik. Hipotesis penelitian berdasarkan rumusan masalah dan dasar teori yang digunakan adalah tidak ada perbedaan yang signifikan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan lain selain dengan pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 dan kemandirian fiskal Kabupaten Kutai Barat selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 belum mandiri.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda menggunakan data tahun 2010-2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja fiskal Kabupaten Kutai Barat setiap tahunnya lebih kecil dari 7 % yang menunjukkan derajat kemandirian fiskalnya dalam kategori rendah, menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima. Analisis horizontal menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dengan dengan pendapatan lain yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 yang ditunjukkan oleh nilai t hitung yang < dibandingkan nilai t tabel, dengan demikian hipotesis penelitian ditolak. Perbedaan ini karena Kabupaten Kutai Barat masih mengandalkan pendapatannya yang bersumber dari Pemerintah pusat dan Propinsi Kalimantan Timur, dan dibarengi dengan derajat kemandirian fiskalnya rendah.

Saran yang diajukan sehubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat agar terus berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan cara menggali potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum tergali dan mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerahnya yang belum optimal, dengan demikian kinerja fiskalnya dapat lebih baik lagi dan ketergantungan pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat berkurang.

Kata Kunci : APBD - Kemandirian Fiskal

ABSTRACTION

Embilia Kristina, Horizontal Comparative Revenue and Expenditure Budget Kutai Barat regency guidance of

Mrs. Elfreda A. Lau as a supervisor I and Mrs. Titin Ruliana as Supervisor II.

The purpose of this research is to analyze and determine significant differences Pendapatan income derived from PAD with other income with other income derived from Fund Balance and Other Income in the State Revenue and Expenditure Kutai Barat regency during the period 2010 to 2014 and analyzed and knowing Kutai Barat fiscal independence during the period of 2010 through 2014.

Basic theory used in the preparation of this thesis is the theory of public accounting. Research hypothesis is based on the formulation of the problem and the basic theory used was no significant difference Pendapatan income derived from PAD with income other than income derived from Fund Balance and Other Income in the State Revenue and Expenditure Kutai Barat regency during the period 2010 through 2014 and fiscal independence of West Kutai district over the period 2010 to 2014 have not been independently.

The analytical tool used in this study is different test uses data from 2010-2014.

The results showed that the fiscal performance Kutai Barat annually less than 7% which indicates the degree of fiscal autonomy in the low category, indicating that the hypothesis is accepted. Horizontal analysis showed a significant difference of income derived from the original income with other income derived from Fund Balance and Other Income in the State Revenue and Expenditure Kutai Barat regency during the period of 2010 through 2014 are shown by the t value is < compared to the value t table, so the research hypothesis is rejected. This difference is due to Kabupaten Kutai Barat still rely on revenue derived from the central government and the province of East Kalimantan, and coupled with a low degree of fiscal independence.

Suggestions put forward in connection with this study as follows:

West Kutai government to continue to try to increase revenue by digging Area of regional revenue potential untapped revenue collection and optimize the capital is not optimal, so performance can be better fiscal and revenue dependence on the Central Government and the Provincial Government of East Kalimantan can be reduced.

Keywords: APBD - Fiscal Independence

PENDAHULUAN

Keuangan daerah merupakan dokumen publik yang berhak diketahui oleh masyarakat. Pemerintah daerah wajib mempublikasikan setiap laporan keuangan daerah kemasyarakat. Empat laporan keuangan yang wajib dipublikasikan adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun untuk melihat efisiensi, dan efektivitas (*value of money*) dari pemerintah daerah, maka kita dapat melihat kinerjanya melalui laporan realisasi anggaran. Dalam laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding.

Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran terdiri atas beberapa elemen (pos) utama yaitu: pendapatan, transfer, belanja, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto dan,

siasa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

Laporan Realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (*back-bone*) penyelenggaraan pemerintahan. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang utama. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang jujur, demokratis, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Pelaku keuangan adalah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, maka pemerintah pusat telah menetapkan UU No. 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah dengan penekanan pada prinsip – prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Selain itu juga mempersiapkan daerah dalam

menghadapi dan mengantisipasi tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri serta tantangan global dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang tentunya didukung oleh sumber – sumber pembiayaan yang bersifat desentralisasi, dekonsentrasi dan sentralisasi yang diberikan berdasarkan kepada kewenangan tugas dan tanggung jawab.

Berdasarkan PP No. 105 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, struktur APBD terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Dalam penyusunan APBD, ketiga komponen ini harus ada. Namun, bagaimana kondisi APBD suatu daerah, apakah defisit atau surplus tergantung pada kapasitas pendapatan yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tidak ada keharusan anggaran belanja semua daerah harus surplus atau defisit.

Jika APBD suatu daerah menunjukkan posisi defisit, maka Pemerintah Daerah (PEMDA) harus menetapkan sumber defisit anggarannya dalam struktur APBD. Komponen pembiayaan ini sangat penting untuk melihat sumber – sumber yang dapat diusahakan daerah. Biasanya sumber pembiayaan defisit dapat dilakukan melalui pinjaman dalam negeri dan luar negeri, serta, melalui penjualan aset – aset daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) yang bersangkutan.

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas- tugas

desentralisasi, sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

Sumber – sumber penerimaan dalam APBD provinsi, kabupaten/kota terdiri dari: pendapatan asli daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan milik daerah dan lain- lain pendapatan yang sah), penerimaan dari dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus), penerimaan pinjaman daerah (penerimaan dari dalam dan luar negeri) dan lain – lain penerimaan yang sah (penerimaan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten lainnya dan lain – lain).

Kemandirian fiskal suatu daerah dapat dilihat sampai sejauh mana pendapatan asli daerahnya menjadi sumber utama biaya pembangunan pada daerah tersebut, semakin besar sumber pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah maka semakin mandiri daerah tersebut. Kemandirian fiskal suatu daerah dapat dilihat dengan cara membandingkan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan suatu daerah.

Berdasarkan uraian ini, maka peneliti penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Komparatif Horizontal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat”**.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kemandirian fiskal Kabupaten Kutai Barat selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 sudah mandiri atau belum ?
2. Apakah ada perbedaan yang signifikan pendapatan yang

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan lain selain dengan pendapatan lain yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 ?

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis dan mengetahui kemandirian fiskal Kabupaten Kutai Barat selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 ?
- b. Mengetahui perbedaan yang signifikan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan lain selain dengan pendapatan lain yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 ?

DASAR TEORI

Akuntansi pemerintahan adalah suatu prosedur akuntansi yang telah disusun sedemikian rupa agar dapat dilakukan monitoring (pemantauan) secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dengan tujuan agar dapat diketahui cara penciptaan, pengurusan dan pemantauan terhadap kepatuhan penggunaan dana.

Menurut Mardiasmo (2004) Tujuan dan fungsi laporan keuangan sector publik adalah :

1. Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*) Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan

pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*accountability and retrospective reporting*) Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
3. Perencanaan & Informasi Otorisasi (*Planning and authorization information*) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
4. Kelangsungan organisasi (*viability*) Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
5. Hubungan Masyarakat (*public relation*) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan

kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber fakta dan gambaran (*source of fact and figures*) Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Menurut Mardiasmo (2009:150) Teknik-teknik akuntansi keuangan terdiri atas :

1. Akuntansi Anggaran
2. Akuntansi Komitmen
3. Akuntansi Dana
4. Akuntansi Kas
5. Akuntansi Akrua

Menurut Yani (2008:149) Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak – pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tujuan keuangan daerah menurut Devas, etal. (1989:124) :

- a. Akuntabilitas (*Accountability*) Pemerintah Daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangan kepada lembaga atau orang yang berkepentingan dan sah.

Lembaga atau orang yang dimaksud antara lain, adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah, masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya (LSM);

- b. Memenuhi kewajiban keuangan
Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- c. Kejujuran
Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai profesional dan jujur, sehingga mengurangi kesempatan untuk berbuat curang.
- d. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*) kegiatan daerah.
Tata cara pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya serendah-rendahnya dengan hasil yang maksimal.
- e. Pengendalian
Manajer keuangan daerah, DPRD dan aparat fungsional pemeriksaan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai. Harus selalu memantau melalui akses informasi mengenai pertanggungjawaban keuangan.
fungsi manajemen keuangan daerah terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yang dapat terdiri dari tugas (Akbar, 2002:221) :
 1. Pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah;
 2. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Tolak ukur kinerja dan standarisasi;
 4. Pelaksanaan Anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi;
 5. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah; dan

6. Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Menurut Yani (2008:243) APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

PEMBAHASAN

Keuangan daerah adalah alat fiskal pemerintah daerah, merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber – sumber ekonomi, menerbitkan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi. peranan keuangan daerah semakin penting, selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan, tetapi juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi. selain itu peranan keuangan daerah yang makin meningkat akan mendapat pelaksanaan otonomi daerah.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak – pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan hak & kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pemisahan dan merupakan

satu kesatuan. Hal yang lebih penting dalam otonomi daerah adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan & pelayanan kepada masyarakat.

Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD. Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dan anggaran penerimaan maupun antara realisasi pengeluaran dengan anggaran penjualan dengan menjelaskan alasannya yang menetapkan apakah selisih tersebut disebabkan oleh faktor-faktor terkendali atau tidak.

Adapun keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta sejumlah biaya administrasi tertentu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Sumber pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten Kutai Barat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan lain yang sah, sedangkan penggunaan dari pendapatan tersebut

diperuntukkan untuk Belanja langsung, Belanja tidak langsung, Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber – sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang – Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Sumber keuangan daerah Kabupaten Kutai Barat yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2010- 2014 setiap tahunnya mengalami peningkatan, demikian juga dengan sumber lainnya yang berasal dari Dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah yang setiap tahunnya mengalami pertumbuhan selain pada tahun 2014, khususnya Yang bersumber dari dana alokasi umum yang dari tahun ke tahun terus bertambah, sebaliknya untuk alokasi dana khusus yang terus menurun, hal ini tentu saja berpengaruh terhadap sumber pendapatan Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan kinerja fiskal Kabupaten Kutai Barat setiap tahunnya lebih rendah dari 7 % yang menunjukkan derajat kemandirian fiskalnya dalam kategori rendah, menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima.

Sedangkan berdasarkan analisis horizontal menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan lain selain Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 yang ditunjukkan oleh nilai t hitung yang $<$ dibandingkan nilai t tabel, dengan demikian hipotesis penelitian ditolak.

Perbedaan ini karena Kabupaten Kutai Barat masih mengandalkan pendapatannya yang bersumber dari Pemerintah pusat dan Propinsi Kalimantan Timur, selain itu dilihat dari derajat kemandirian fiskalnya rendah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka kesimpulan penelitian ini

Kinerja fiskal Kabupaten Kutai Barat setiap tahunnya lebih kecil dari 7 % yang menunjukkan derajat kemandirian fiskalnya dalam kategori rendah, menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima.

Analisis horizontal menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan lain yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 yang ditunjukkan oleh nilai t hitung yang $<$ dibandingkan nilai t tabel, dengan demikian hipotesis penelitian ditolak.

Perbedaan ini karena Kabupaten Kutai Barat masih mengandalkan pendapatannya yang bersumber dari Pemerintah pusat dan Propinsi Kalimantan Timur, dan dibarengi dengan derajat kemandirian fiskalnya rendah

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, bahrullah, 2002. Fungsi *Manajemen Keuangan Daerah*. Majalah Pemeriksa Edisi No.87, Oktober.
- Devas, Nick.,et.al, 1989. *Keuangan Daerah di Indonesia*. Penerbit UI Press, Jakarta
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kedua, Cetakan pertama. Andi Yogyakarta.
- Yani, Ahmad, 2008, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.